

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG ORGANISASI.

Berdasarkan Peraturan DPDTT R.I. Nomor PER.6 / 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen PKTrans) sebagai berikut :

1. Kedudukan.

Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen PKTrans) berkedudukan sebagai salah satu unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang menangani sebagian dari sub sistem penyelenggaraan transmigrasi dan mempunyai peranan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional dari aspek pemerataan serta penciptaan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru.

2. Tugas

Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen PKTrans) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan kawasan transmigrasi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi **menyelenggarakan fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi meliputi pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, pelayanan pertanahan, serta promosi dan kemitraan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi meliputi pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, pelayanan pertanahan, serta promosi dan kemitraan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi meliputi pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, pelayanan pertanahan, serta promosi dan kemitraan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembangunan dan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi meliputi pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, pelayanan pertanahan, serta promosi dan kemitraan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

B. STRUTUR ORGANISASI.

Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen PKTrans) terdiri atas :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal ;
- b. Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan (Dit. PSPK) ;
- c. Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi (Dit. PUT) ;
- d. Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi (Dit. PSBT) ;
- e. Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi (Dit. PPT) ;
- f. Direktorat Promosi dan Kemitraan (Dit. Prokem);

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen PKTrans) dapat dilihat sebagaimana **lampiran 1 (Struktur Organisasi Ditjen PKTrans)**

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi selama Tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan,

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja,

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015,

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan . penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup,

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Struktur Organisasi
- 2) Perjanjian Kinerja

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Secara ringkas substansi Renstra Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Visi dan Misi Presiden, yaitu:

**TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.**

Maka sebagai upaya dalam pencapaian visi tersebut, dirumuskan **misi** pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sementara di dalam penjabaran NAWACITA, terdapat CITA yang terkait langsung dengan bidang Ketransmigrasian, khususnya pada CITA ke-3, ke-5 dan ke-7. Dengan memperhatikan program prioritas yang terkait dengan bidang Ketransmigrasian yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran dalam mengatasi ketertinggalan dan kesenjangan; dan pembangunan transmigrasi dalam menciptakan pertumbuhan wilayah.

2. Tujuan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

- 1) Peningkatan pembangunan dan pengembangan satuan permukiman dan desa di kawasan transmigrasi dan kawasan perdesaan menjadi desa berkembang dan desa mandiri di daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah strategis dan cepat tumbuh.
- 2) Peningkatan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi pada daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah strategis dan cepat tumbuh serta kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah.
- 3) Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

3. Sasaran Strategis Ketransmigrasian

1. Terbangunnya 144 kawasan untuk mendukung redistribusi lahan terkait program reforma agraria, dan berkembangnya 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian/perikanan dan mendukung sasaran kemandirian pangan nasional.
2. Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi kota-kota kecil yang berfungsi sebagai pusat industri pengolahan sekunder dan perdagangan serta sebagai pusat pelayanan kawasan transmigrasi

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi disusun untuk mengatasi permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh organisasi yang tertuang dalam Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Adapun Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)
1. Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi Embrio kota kecil/kota kecamatan	▪ Jumlah Satuan Permukiman (SP) Mandiri	▪ 19 SP
	▪ Kawasan yang berkembang sebagai embrio Pusat Pertumbuhan	▪ 6 KPB

Indikator Kinerja Utama tersebut dapat dicapai melalui melalui indikator-indikator kinerja kegiatan sebagai Berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1. Terlaksananya Pelayanan Teknis dan Administratif Ditjen PKTrans	▪ Jumlah pelayanan teknis dan administratif Ditjen PKTrans	▪ 12 Bulan
2. Tersedianya Satuan Permukiman (SP)/Kawasan Transmigrasi yang Sarana dan Prasarananya Berkembang dan Berfungsi	▪ Jumlah Satuan Permukiman (SP)/KPB/Kawasan yang dikembangkan sarana dan prasarananya	▪ 46 SP/KPB /KWS
	▪ Jumlah Satuan Permukiman (SP)/KPB/Kawasan transmigrasi yang menerapkan rencana aksi pengelolaan lingkungan	▪ 4SP/KPB/KWS

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Satuan Permukiman (SP) yang difasilitasi pengalihan pengembangannya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 19 SP
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Kawasan Perkotaan Baru (KPB) sesuai dengan tingkat perkembangannya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 KPB
3. Tersedianya Kimtrans yang Pendapatan Transmigrasinya Sesuai dengan Tahapan Pengembangannya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah produksi primer yang mendukung kemandirian pangan ▪ Jumlah Satuan Permukiman (SP)/KPB/Kawasan transmigrasi yang dikembangkan usaha ekonominya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 13.879,1 Ha ▪ 106 SP/KPB/KWS
4. Tersedianya Satuan Permukiman (SP), KPB, Kawasan yang Mencapai Tingkat Perkembangan Sosial Budaya Sesuai dengan Tahapan Pengembangannya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah keluarga yang mendapat bantuan pangan di Satuan Permukiman ▪ Jumlah Satuan Permukiman (SP)/KPB/Kawasan yang mendapat layanan sosial budaya ▪ Jumlah SP/KPB/Kawasan yang lembaga sosial budayanya terbentuk dan berfungsi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 11.278 KK ▪ 96 SP/KPB/KWS ▪ 179 Lembaga
5. Terasilitasinya Pelayanan Pertanahan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah bidang tanah transmigrasi yang difasilitasi pengurusan sertifikatnya ▪ Jumlah masalah pertanahan transmigrasi yang difasilitasi penanganannya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 24.889 Bidang ▪ 20 Kasus
6. Tersedianya Satuan Permukiman (SP)/Kawasan Transmigrasi yang Berkembang Melalui Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah lembaga dan kelompok masyarakat yang bersedia berpartisipasi sebagai mitra dalam pengembangan kawasan transmigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 12 Lembaga/ Kelompok Masyarakat

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dengan mempertimbangkan alokasi anggaran tahun 2015, Rencana Pembangunan Permukiman Transmigrasi Baru (PTB) dan Rencana Penempatan Transmigran di PTB, Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi telah membuat penetapan kinerja tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini tetap mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta RPJMN tahun 2015-2019, namun dengan target sebagaimana dalam tabel berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)
1. Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi Embrio kota kecil/kota kecamatan	<ul style="list-style-type: none">▪ Jumlah Satuan Permukiman (SP) Mandiri▪ Kawasan yang berkembang sebagai embrio Pusat Pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none">▪ 19 SP▪ 6 KPB

Indikator Kinerja Utama tersebut dapat dicapai melalui melalui indikator-indikator kinerja kegiatan sebagai Berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1. Terlaksananya Pelayanan Teknis dan Administratif Ditjen PKTrans	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah pelayanan teknis dan administratif Ditjen PKTrans 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 12 Bulan
2. Tersedianya Satuan Permukiman (SP)/Kawasan Transmigrasi yang Sarana dan Prasarananya Berkembang dan Berfungsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Satuan Permukiman (SP)/KPB/Kawasan yang dikembangkan sarana dan prasarananya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 46 SP/KPB /KWS
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Satuan Permukiman (SP)/KPB/Kawasan transmigrasi yang menerapkan rencana aksi pengelolaan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4SP/KPB/KWS
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Satuan Permukiman (SP) yang difasilitasi pengalihan pengembangannya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 19 SP
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Kawasan Perkotaan Baru (KPB) sesuai dengan tingkat perkembangannya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 KPB
3. Tersedianya Kimtrans yang Pendapatan Transmigrasinya Sesuai dengan Tahapan Pengembangannya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah produksi primer yang mendukung kemandirian pangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 13.879,1 Ha
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Satuan Permukiman (SP)/KPB/Kawasan transmigrasi yang dikembangkan usaha ekonominya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 106 SP/KPB/KWS
4. Tersedianya Satuan Permukiman (SP), KPB, Kawasan yang Mencapai Tingkat Perkembangan Sosial Budaya Sesuai dengan Tahapan Pengembangannya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah keluarga yang mendapat bantuan pangan di Satuan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 11.278 KK
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Satuan Permukiman (SP)/KPB/Kawasan yang mendapat layanan sosial budaya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 96 SP/KPB/KWS
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah SP/KPB/Kawasan yang lembaga sosial budayanya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 179 Lembaga

terbentuk dan berfungsi

5. Terasilitasinya Pelayanan Pertanahan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none">▪ Jumlah bidang tanah transmigrasi yang difasilitasi pengurusan sertifikatnya▪ Jumlah masalah pertanahan transmigrasi yang difasilitasi penanganannya	<ul style="list-style-type: none">▪ 24.889 Bidang/persil▪ 20 Kasus
6. Tersedianya Satuan Permukiman (SP)/Kawasan Transmigrasi yang Berkembang Melalui Kemitraan	<ul style="list-style-type: none">▪ Jumlah lembaga dan kelompok masyarakat yang bersedia berpartisipasi sebagai mitra dalam pengembangan kawasan transmigrasi	<ul style="list-style-type: none">▪ 12 Lembaga/ Kelompok Masyarakat

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA.

1. Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2015

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen PKTrans) tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi tahun 2015 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Ditjen PKTrans tahun 2015 berdasarkan hasil pengukuran sebagai berikut :

SASARAN 1			
Terlaksananya Pelayanan Teknis dan Administratif Ditjen PKTrans			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah pelayanan teknis dan administratif Ditjen PKTrans 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 12 Bln 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 12 Bln 	100 %
SASARAN 2			
Tersedianya Satuan Permukiman (SP)/Kawasan Transmigrasi yang Sarana dan Prasarannya Berkembang dan Berfungsi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Satuan Permukiman (SP)/KPB/Kawasan yang dikembangkan sarana dan prasarannya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 46 SP/6 KPB 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 105 SP/ 15 KPB 	230,77 %
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Satuan Permukiman (SP)/KPB/Kawasan transmigrasi yang menerapkan rencana aksi pengelolaan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 SP/KPB/KWS 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 SP/ 2 KPB 	75 %
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Satuan Permukiman (SP) yang difasilitasi pengalihan pengembangannya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 19 SP 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 19 SP 	100 %

▪ Jumlah Kawasan Perkotaan Baru (KPB) sesuai dengan tingkat perkembangannya	▪ 6 KPB	7 KPB	110 %
---	---------	-------	-------

SASARAN 3

Tersedianya Kimtrans yang Pendapatan Transmigrasinya Sesuai dengan Tahapan Pengembangannya

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
▪ Jumlah produksi primer yang mendukung kemandirian pangan	▪ 13.879,1 Ha	▪ 14.943,9 Ha	107.67 %
▪ Jumlah Satuan Permukiman (SP)/KPB/Kawasan transmigrasi yang dikembangkan usaha ekonominya	106 SP/KPB/KWS	99 SP/15 KPB	107.54 %

SASARAN 4

Tersedianya Satuan Permukiman (SP), KPB, Kawasan yang Mencapai Tingkat Perkembangan Sosial Budaya Sesuai dengan Tahapan Pengembangannya

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
▪ Jumlah keluarga yang mendapat bantuan pangan di Satuan Permukiman	▪ 11.278 KK	▪ 8.225 KK	75,49 %
▪ Jumlah Satuan Permukiman (SP)/KPB/Kawasan yang mendapat layanan sosial budaya	▪ 96SP/KPB/KWS	▪ 170 SP/KPB/KWS	177,08 %
▪ Jumlah SP/KPB/Kawasan yang lembaga sosial budayanya terbentuk dan berfungsi	▪ 179 Lembaga	▪ 340 Lembaga	189,94 %

SASARAN 5

Terfasilitasinya Pelayanan Pertanahan Transmigrasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
▪ Jumlah bidang tanah transmigrasi yang difasilitasi pengurusan sertifikatnya	▪ 24.889 Bidang	▪ 25.266 Bidang	101,51 %
▪ Jumlah masalah pertanahan transmigrasi yang difasilitasi penanganannya	▪ 20 Kasus	▪ 22 Kasus	110 %

SASARAN 6			
Tersedianya Satuan Permukiman (SP)/Kawasan Transmigrasi yang Berkembang Melalui Kemitraan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
<ul style="list-style-type: none"> Jumlah lembaga dan kelompok masyarakat yang bersedia berpartisipasi sebagai mitra dalam pengembangan kawasan transmigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> 12 Lembaga/ Kelompok Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> 12 Lembaga/ Kelompok Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %

2. Analisis capaian kinerja

A. Analisis Sasaran 1.

SASARAN 1			
Terlaksananya Pelayanan Teknis dan Administratif Ditjen PKTrans			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pelayanan teknis dan administratif Ditjen PKTrans 	12 Bulan	12 Bulan	100 %

Kegiatan ini merupakan kegiatan layanan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam mendukung tercapainya sasaran program pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi. Adapun output utama dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran. (162 Dokumen, terealisasi 162 Dokumen).**

Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan baik Satker Pusat maupun Satker Daerah yang mendapat alokasi Dana Tugas Pembantuan dari Ditjen PKTrans Output Utama berupa Dokumen RKA-KL yang diwujudkan melalui tahapan-tahapan secara berjenjang (komponen kegiatan) yang harus dilaksanakan. Untuk menghasilkan dokumen yang akurat dan valid sesuai kebutuhan di lapangan maka dilakukan aktifitas

pendukung. Adapun komponen kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan output ini adalah sebagai berikut :

a) Komponen Utama :

- Penyusunan Renstra – RPJM 2015 – 2019
Penyusunan Draft awal Renstra Ditjen PKTrans kinerja terealisasi 100 %, dengan realisasi keuangan (86.3%).
- Penyusunan Dokumen Renja KL PKTrans Tahun 2015
telah selesai disusun dengan realisasi keuangan (95%)
- Penyusunan Dokumen Nota Keuangan kinerja terealisasi 100 %, keuangan realisasi 99.83%
- Penyusunan Dokumen RKA-KL secara kinerja terealisasi 100 %,
 - Kegiatan penyusunan Dokumen RKA-KL terdiri atas Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif (realisasi 100 %), Sinkronisasi dan Penelahaan RKA-KL dengan Daerah (realisasi 85.11%), Penyempurnaan Hasil Sinkronisasi Penelahaan dengan daerah (realisasi 99.75%), Penelitian dan Reviu serta penyempurnaan Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran (realisasi 85 %)
 - Koordinasi Lintas sektor berkaitan dengan Kegiatan Penyusunan RKA/KL, realisasi 91.50%

b) Komponen Pendukung :

- Penyusunan Dokumen Program Kerja Tahun 2015
 - Kegiatan Penyusunan Program Kerja Setditjen PKTrans dan Program Kerja Ditjen PKTrans telah selesai disusun pada bulan Mei 2015, realisasi (98%).
- Evaluasi Kebijakan Ditjen PKTrans Tahun 2015.
 - Kegiatan Evaluasi Kebijakan Ditjen PKTrans Tahun 2015 telah dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 17 Oktober 2015, realisasi (95%).

- Fasilitasi Pembinaan Rencana, Program dan Pelaksanaan Program PKTrans, pada bulan Oktober telah dilaksanakan di provinsi Aceh Kabupaten Bener Meriah dan Subulussalam, realisasi 83.30%.
- Bintek Aplikasi RKAKL Tahun 2016 sebanyak 1 angkatan telah selesai dilaksanakan 19 Agustus 2015, realisasi (96.50%).
- Forum Komunikasi Ketrasmigrasian Bidang PKTrans yang dilakukan di 3 (tiga) wilayah yaitu Wilayah Sulawesi, Maluku, Maluku Utara dan Papua serta Papua Barat di Makassar pada tanggal 11 s.d 13 Juni 2015. Wilayah Kalimantan dan NTB, NTT di Mataram pada tanggal 15 s.d 17 Juni 2015, kegiatan ini melibatkan unsur dari Pusat (Ditjen PKTrans), Provinsi dan Kab./Kota, untuk Wilayah Sumatera dilaksanakan di Palembang pada tanggal 1 s.d 3 Juli 2015, realisasi (97.40%).

Laporan Kegiatan dan Pembinaan

Dokumen pelaporan merupakan wujud pertanggungjawaban kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan tahun 2015. Penyusunan dokumen pelaporan ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Nomor 29 Tahun 2010. Output ini terdiri dari beberapa sub output sebagai berikut:

1) Data dan Informasi PKTrans.

Komponen kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan sub output ini adalah:

a) Komponen Utama :

- Penyusunan Buku Data UPT Bina Tahun 2015 (telah disusun hingga bulan Desember 2015, realisasi (99.23%)

b) Komponen Pendukung :

- Pemutakhiran Data dan Informasi Ditjen PKTrans, sampai akhir Desember 2015 realisasi keuangan 89.01%

- Publikasi Ketrasmigrasian Bidang PKTrans, sampai akhir Desember realisasi keuangan 99.90%
- Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Kimtrans sampai akhir November realisasi keuangan (82.17%)

2) Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas Ditjen PKTrans berbasis Kinerja.

Komponen kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan sub output ini adalah:

a) Komponen Utama :

- Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas PKTrans berbasis Kinerja.
 - Laporan Bulanan kinerja terealisasi 100 %, keuangan realisasi 96.17%; Triwulan kinerja terealisasi 100 %, keuangan realisasi 99.17%; Laporan Tahunan Ditjen kinerja terealisasi 100 %, Keuangan realisasi 98.35%; dan Setditjen PKTrans kinerja terealisasi 100 % , realisasi 98%;
 - Laporan Kegiatan Pimpinan Ditjen PKTrans Tahun 2015, realisasi (86.22)%;
 - Laporan Capaian Kinerja Ditjen PKTrans Tahun 2015, kinerja terealisasi 100 %,, realisasi (94.57)%.

b) Komponen Pendukung :

- Pengendalian Pelaksanaan Program dan Anggaran sampai akhir Desember realisasi (87.13 %);
- Monitoring dan Evaluasi ke Daerah sampai akhir Desember telah dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, NAD, Sumatera Selatan Sulawesi Tengah, NTT, NTB, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, realisasi (87.61%);
- Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ditjen PKTrans dan Direktorat dilingkungan Ditjen PKTrans, telah dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 18

November 2015 di Arch Hotel Bogor. Sampai akhir November 2015 realisasi (91.76 %);

- Rapat Kerja Teknis diikuti oleh semua Satker yang mendapat alokasi Dana Tugas Pembantuan Ditjen PKTrans Tahun 2015, kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 8 Oktober 2015 di Hotel Mercure, Ancol – Jakarta Utara. Sampai akhir bulan Desember kegiatan ini telah selesai penulisan laporan akhir, realisasi (91.18 %);.

- **Dokumen Pelaksanaan dan pelaporan Berbasis Kinerja.**

Dokumen laporan pelaksanaan anggaran merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang telah dialokasikan ke Satker baik Pusat maupun Daerah yang mendapat alokasi Dana Tugas Pembantuan dari Ditjen PKTrans Tahun 2015. Penyusunan dokumen pelaporan ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan RI serta peraturan lain yang terkait dengan laporan keuangan. Output ini terdiri dari sub output sebagai berikut :

1) Dokumen Pengelolaan Anggaran.

Komponen kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan sub output ini adalah:

a) Komponen Utama :

- Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Ditjen PKTrans Tahun 2015 sebanyak 152 Satker (Pusat dan Daerah).

b) Komponen Pendukung :

- Penyusunan Dokumen Revisi DIPA dan POK
- Rapat pemantapan pelaksanaan anggaran.
- Pengendalian dan pembinaan Pelaksanaan Anggaran.
- Menyiapkan Bahan Perbendaharaan
- Memverifikasi dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);

2) Dokumen Laporan Keuangan

Komponen kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan sub output ini adalah:

a) Komponen Utama :

- Menyiapkan Bahan Akuntansi Eselon I, terealisasi 100 %;
- Melaksanakan Pembinaan Laporan Akuntansi keuangan, terealisasi 100 %;

b) Komponen Pendukung :

- Melaksanakan Pembinaan Laporan Akuntansi keuangan;
- Melaksanakan Pemutahiran Data Laporan Akuntansi Keuangan Tingkat Eselon I;
- Menyiapkan Bahan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) eselon I;
- Melaksanakan Pembinaan Laporan Data BMN;
- Melaksanakan Pemantauan Pelaksanaan Anggaran;

- **Peningkatan Kompetensi Pegawai.**

Sumberdaya Manusia merupakan unsur yang paling penting dalam menjalankan roda organisasi. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasarannya, Ditjen PKTrans perlu didukung oleh SDM yang handal dan kompeten sesuai dengan bidangnya masing-masing serta harus memenuhi kuantitas yang diperlukan. Untuk itu selama tahun 2015 Ditjen PKTrans telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya memenuhi target yang telah ditetapkan. Strategi untuk memenuhi target tersebut dilakukan melalui peningkatan Kompetensi Pegawai. Peningkatan Kompetensi Pegawai ditargetkan 358 orang, capaiannya 352 orang, atau dapat dikatakan capaian outputnya sebesar 98,32 % . Adapun komponen kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan output ini adalah sebagai berikut (kegiatan yang telah dilaksanakan sampai akhir bulan Oktober):

a) Komponen Utama :

- Administrasi kepegawaian, realisasi (95%)
- Pembinaan pegawai Ditjen PKTrans, realisasi (97.82%)

b) Komponen Pendukung :

- Sosialisasi Undang – Undang Aparatur Sipil Negara dan Kode Etik PNS, , realisasi (100%)
- Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia yang meliputi: Bimbingan Teknis SDM dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Individu dan

Penilaian Kinerja PNS, Bimbingan Teknis SDM Bidang Kearsipan, realisasi (93%)

- Pembentukan Karakter Kepemimpinan SDM di Lingkungan Setditjen PKTrans, realisasi (95%)
- Peningkatan Kapasitas SDM Pegawai Ditjen PKTrans, realisasi (100%)

- **Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Ditjen PKTrans**

Pada tahun 2015 telah dilakukan berbagai upaya demi lancarnya operasional pelayanan Hukum di lingkungan Ditjen PKTrans . Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria target dan capaian sudah sesuai yaitu 17 paket, atau dapat dikatakan dapat dicapai 100 %. Adapun komponen kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan output ini adalah sebagai berikut :

a) Komponen Utama :

- Tersedianya Konsep Penyusunan Kepmen/Permen Tentang Pedoman Teknis Bidang PKTrans
- Tersedianya Layanan Informasi Hukum

b) Komponen Pendukung :

- Penyiapan KEPMEN/PERMEN tentang Pedoman Teknis Bidang PKTrans
- Penataan Peraturan per Undang Undangan Ditjen PKTrans melalui beberapa kegiatan yaitu : Identifikasi dan Analisis Peraturan per Undang Undangan, Revisi Peraturan per Undang Undangan, Sosialisasi tentang Peraturan per Undang Undangan, Menyiapkan Bahan Rancangan tentang Peraturan Menteri Bidang ketrasmigrasian, Fasilitasi Penyusunan Naskah Kesepahaman Bersama (NKB), Fasilitasi Penyusunan Perjanjian Kerjasama (PKS)
- Kajian Hukum dan Bantuan Hukum Melalui:
 - Advokasi Hukum
 - Pendampingan Hukum
 - Evaluasi Pemberian Bantuan Hukum dan pendampingan Hukum
 - Layanan Informasi Hukum

c) Pengkajian Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana

- Standart Operasional Prosedur (SOP) Ditjen PKTrans

- Melaksanakan Korordinasi dan sinkronisasi dalam Rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB
 - Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan/Data dan Informasi Permukiman Transmigrasi
- **Layanan Perkantoran.**
- Dalam rangka menunjang kelancaran pegawai dalam bekerja maka Ditjen PKTrans berupaya untuk selalu meningkatkan kenyamanan sehingga diharapkan mendapat hasil yang maksimal. Adapun komponen kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan output ini adalah sebagai berikut :
- a) Komponen Utama :
 - Operasional Perkantoran dapat dilaksanakan tiap bulanya atau secara capaian kinerja 100 %, realisasi sampai Desember (90%)
 - b) Komponen Pendukung :
 - Langganan Daya / Jasa.
 - Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor
 - Perawatan/Pemeliharaan Peralatan Kantor
 - Pemeliharaan Nilai Gedung dan Bangunan Kegiatan telah selesai dilaksanakan
 - Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor
 - Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas. Roda 4

Realisasi Anggaran

Dukungan anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PKTrans setelah revisi sebesar Rp 68.580.304.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah) yang terdiri pusat dan daerah. Adapun realisasi penyerapan anggaran sampai dengan posisi 31 Desember 2015 dalam mendukung pelaksanaan indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu	Realisasi		
			Keuangan	%	Fisik%
1	Pusat	37.022.076.000	28.389.544.254	81,26	89,21
2	Daerah	31.558.228.000	29.140.584.003	92,34	95,49
	Jumlah	68.580.304.000	57.530.128.257	83,89	91,11

Secara garis besar dapat dilihat bahwa capaian kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PKTrans dapat dikategorikan **Baik** atau **Berhasil**, sedangkan Capaian Keuangan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya hanya tercapai sebanyak **83.89 %**, disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- Sisa belanja pegawai (Gaji, Tunkin dan Transito) yang tidak bisa dibayarkan (dikarenakan staf pindah ke Unit Kerja Eselon (UKE I) lainnya sebanyak **Rp.5.876.265.000,-** atau **12 %** dari jumlah anggaran total dari Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

Adapun tindak lanjut untuk ke depan diperlukan suatu pemetaan yang tepat dalam penggajian pegawai, pemberian tunjangan kinerja dana cadangan transito dengan menghitung jumlah sumber daya manusia yang ada.

B. Analisis Sasaran 2.

SASARAN 2			
Tersedianya Satuan Permukiman (SP)/Kawasan Transmigrasi yang Sarana dan Prasarannya Berkembang dan Berfungsi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Satuan Permukiman (SP)/KPB/Kawasan yang dikembangkan sarana dan prasarannya 	<ul style="list-style-type: none"> 46 SP/ 6 KPB 	<ul style="list-style-type: none"> 105 SP/ 15 KPB 	230,77 %
<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Satuan Permukiman (SP)/KPB/Kawasan transmigrasi yang menerapkan rencana aksi pengelolaan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> 4 SP/KPB/KWS 	<ul style="list-style-type: none"> 2 SP/1 KPB 	75 %

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Satuan Permukiman (SP) yang difasilitasi pengalihan pengembangannya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 19 SP 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 19 SP 	100 %
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Kawasan Perkotaan Baru (KPB) sesuai dengan tingkat perkembangannya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 KPB 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 7 KPB 	110 %

Analisis Capaian Kinerja

Realisasi kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana prasarna kawasan transmigrasi lebih besar dari Target yang ada karena adanya dana optimalisasi dan APBN-P Tahun 2015, yang dialokasikan untuk mendukung kebutuhan Sarana dan Prasarana di Permukiman dan Kawasan Transmigrasi. Kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana prasarna kawasan transmigrasi dapat dicapai melalui output dan komponen sebagai berikut :

Indikator Jumlah Satuan Permukiman (SP)/KPB/Kawasan yang dikembangkan sarana dan prasarannya

Jalan

1) Komponen Utama

Pengembangan jalan 1,5 km (DIPA/Dana Pusat) dan 472 km (Tugas Pembantuan Daerah), sampai dengan Desember 2015 progres fisik 96,27 % (456,495 Km) dan keuangan 95,36%.

2) Komponen Pendukung

a) Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Penghubung/Poros di kimtrans Suppi, Kab. Tana Toraja, Prov. Sulawesi Selatan (Tugas Pembantuan Daerah).

Secara fisik pekerjaan telah mencapai 100% dan Keuangan 98%.

b) Pemetaan jaringan jalan di kawasan transmigrasi 3 paket, yaitu :

- Kawasan Sekayu, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan 1 Paket.
- Kawasan Bokat, Kab. Buol, Prov. Sulawesi Tengah 1 Paket.

- Kawasan Pasahari, Kab. Maluku Tengah. Prov. Maluku 1 Paket. Secara fisik pekerjaan telah mencapai 100% dan Keuangan 99,60%.
- c). Bantuan sarana dan prasarana di Desa Rantau Panjang berupa peningkatan jalan sepanjang 0,648 km. Secara fisik pekerjaan telah mencapai 100% dan Keuangan 97,64%.

Pengembangan Drainase

Komponen Utama

Pengembangan drainase 41,3 km (Tugas Pembantuan Daerah). Sampai dengan akhir bulan Desember 2015 progres fisik 100% (41,3 Km) dan keuangan 96,17 %.

Pengembangan Sarana Air Bersih

1) Komponen Utama

- a) Pembangunan sarana air bersih sebanyak 29 unit di 13 kimtrans dan 5 kawasan. Sampai dengan akhir bulan Desember 2015 progres fisik 100% (29 unit) dan keuangan 95,62%.
- b) Supervisi Pembangunan Sarana Air Bersih.

2) Komponen Pendukung

- a) Perencanaan Teknis Sarana Air Bersih sebanyak 3 paket di kimtrans Sei Pelang, Tinauka SP. 3 dan KTM Mesuji. Secara fisik pekerjaan telah mencapai 100% dan keuangan 98,32%.
- b) Supervisi/pengawasan perencanaan teknis sarana air bersih.
- c) Bantuan sarana dan prasarana di UPT Warikon berupa pembuatan SAB Sumur Pompa sebanyak 10 unit. Secara fisik pekerjaan telah mencapai 100% dan keuangan 97,64%.

Pengembangan Energi Terbarukan

1) Komponen Utama

- a) Pembangunan dan Pengembangan Energi Terbarukan sebanyak 115 unit yang terdiri dari SHS dan PJU sebanyak 105 unit yang berada di 3 kimtrans dan PLTS Komunal sebanyak 10 paket yang tersebar di 9 kimtrans dan 1 kawasan, dengan perincian :

1. Lailara, Kab. Sumba Timur Prov. NTT

2. Gedong Karya SP. 1, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi.
3. Jeringo, Kab. Lombok Timur, Prov. Nusa Tenggara Barat
4. Botteng Pasembuk, Kab. Majene, Prov. Sulawesi Barat.
5. La Tappu, Kab. Sumba Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur.
6. Kaipera, Kab. Alor, Prov. NTT
7. Werianggi, Kab. Teluk Wondama, Prov. Papua Barat
8. Tomage, Kab. Fakfak Prov. Papua Barat
9. Kumai Seberang Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah.
10. Sei Mata-Mata Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat
11. Satai Lestari Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat
12. Keliling Semulung Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat
13. KTM Kikim, Kab. Lahat, Prov. Sumatera Selatan.

b) Supervisi Pembangunan dan Pengembangan PLTS

Sampai dengan akhir bulan Desember 2015 dengan realisasi fisik 100% (115 unit) dan keuangan 93,44%.

2) Komponen Pendukung

a) Perencanaan Teknis PLTS Komunal 2 paket/6 lokasi

Progres fisik 100% dan keuangan 97,41%.

b) Supervisi pemasangan PLTS 2 paket

Pengembangan FU

1) Komponen Utama

Rehabilitasi dan Pembangunan Fasilitas Umum sebanyak 165 Unit (Tugas Pembantuan Daerah) yang tersebar di 49 kimtrans dan 11 kawasan. Sampai dengan bulan Desember 2015 progres fisik 98,79% (163 unit) dan keuangan 95,14%.

2) Komponen Pendukung

Bantuan Sarana dan Prasarana berupa Rehab Fasilitas Umum sebanyak 6 unit di UPT Laeya, pembangunan toilet umum islamic center KTM Telang

dan penimbunan halaman SMK Terpadu Islamic Center di lokasi KTM Rambutan Parit.

Progres fisik 100% dan keuangan 97,64%.

Rehab Rumah Transmigrasi

1) Komponen Utama

Rehabilitasi rumah transmigran sebanyak 448 unit (Tugas Pembantuan Daerah) dan 70 unit (DIPA/Dana Pusat), sampai dengan bulan Desember 2015 progres fisik 100% (418 unit) dan keuangan 96,23%.

2) Komponen Pendukung

Bantuan Sarana dan Prasarana berupa Rehab Rumah Transmigran sebanyak 70 unit dan sumur gali sebanyak 30 unit.

Progres fisik 100% dan keuangan 97,64%.

Komponen Pendukung lainnya untuk seluruh kegiatan :

- Bantuan Teknis dalam bidang Perencanaan Teknis dan Pelaksanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana di 5 kabupaten.
- Bimbingan teknis Pembangunan sarana dan Prasarana kawasan Transmigrasi di 2 kabupaten.
- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan sarana dan Prasarana di 3 kimtrans (Tugas Pembantuan Daerah)
- Sosialisasi Pedoman Pengembangan sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi di 4 kabupaten.
- Pengendalian pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana di 10 kimtrans.

Indikator Jumlah Satuan Permukiman (SP)/KPB/Kawasan transmigrasi yang menerapkan rencana aksi pengelolaan lingkungan

Rencana Aksi Penyerasian Lingkungan

Komponen Utama

- Rencana Aksi Penyerasian Lingkungan dilaksanakan di 1 permukiman transmigrasi yaitu La Tappu Kabupaten Sumba Barat Provinsi NTT.

- Rencana Aksi Penyerasian Lingkungan dilaksanakan di 2 KPB yaitu KTM Parit Rambutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan KTM Ponu Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT.
- Pemantauan Lingkungan yang dilaksanakan di 11 Permukiman Transmigrasi.

Indikator Jumlah Satuan Permukiman (SP) yang difasilitasi pengalihan pengembangannya

Evaluasi Perkembangan Permukiman

Komponen Utama

- Evaluasi Perkembangan Permukiman dalam rangka Pengalihan Pengembangan Permukiman Transmigrasi Tahun 2016 di 28 kimtrans (12 provinsi/26 kabupaten) sampai dengan bulan Desember 2015 telah selesai dilaksanakan secara fisik 100 % dan keuangan 106,12 %.
- Kelompok Kerja Pengalihan Pengembangan Satuan Permukiman Tahun 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 telah selesai dilaksanakan secara fisik 100 % dan keuangan 95,83 %

Indikator Jumlah Kawasan Perkotaan Baru (KPB) sesuai dengan tingkat perkembangannya

Evaluasi Perkembangan Kawasan

Komponen Utama

Evaluasi Perkembangan Kawasan Tahun 2016, dari target 6 lokasi KTM dapat dioptimalkan menjadi 7 lokasi KTM (7 provinsi/7 kabupaten) dengan progress sampai dengan bulan Desember 2015 telah selesai dilaksanakan secara fisik 100 % dan keuangan 93,01 %.

Rincian lokasi kegiatan :

1. KTM Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.
2. KTM Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.
3. KTM Cahaya Baru Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalsel.
4. KTM Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulbar
5. KTM Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalbar.

6. KTM Lagita Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu.
7. KTM Lamunti Kabupaten Kapuas Provinsi Kalteng.

Realisasi Anggaran

Dukungan anggaran Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi setelah revisi sebesar Rp. 552.505.203.000,- (Lima ratus lima puluh dua milyar lima ratus lima juta dua ratus tiga ribu rupiah) yang terdiri pusat dan daerah. Adapun realisasi penyerapan anggaran sampai dengan posisi 31 Desember 2015 dalam mendukung pelaksanaan indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu	Realisasi		
			Keuangan	%	Fisik%
1	Pusat	22.191.659.000	21.472.858.424	96,76	97,62
2	Daerah	530.313.544.000	484.303.498.506	95,33	96,59
	Jumlah	552.505.203.000	505,776,356,930	96,05	97,11

Secara garis besar dapat dilihat bahwa capaian kinerja maupun capaian keuangan kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Transmigrasi dapat dikategorikan **Baik** atau **Berhasil**

C. Analisis Sasaran 3

SASARAN 3			
Tersedianya Kimtrans yang Pendapatan Transmigrasinya Sesuai dengan Tahapan Pengembangannya			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah produksi primer yang mendukung kemandirian pangan ▪ Jumlah Satuan Permukiman (SP)/KPB/Kawasan transmigrasi yang dikembangkan usaha ekonominya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 13.879,1 Ha ▪ 106 SP/KPB/KWS 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 14.943,9 Ha ▪ 99 SP/15 KPB 	<ul style="list-style-type: none"> 107.67 % 107.54 %

Analisis Capaian Kinerja

Realisasi kegiatan pengembangan usaha transmigrasi dicapai melalui output dan komponen sebagai berikut :

Jumlah produksi primer yang mendukung kemandirian pangan

Dari target kinerja sebesar 13.879,10 Ha telah dapat direalisasikan sebesar 14.945,95 Ha (108%) dengan rincian pusat seluas 7.656,25 Ha (118%) dan rincian daerah seluas 7.298,70 Ha (98%), dengan rincian sebagai berikut:

- PUSAT

Jumlah produksi primer yang mendukung kemandirian pangan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tersebut dapat dipenuhi melalui output-output sebagai berikut :

Lahan usaha produktif dan produksi tanaman pangan dan non tanaman pangan di Satuan Permukiman/Kawasan Transmigrasi

Pengembangan Tanaman Pangan (padi) di 12 KTM seluas 5.700 Ha (fisik 100%):

➤ KTM Lunang Silaut	:	600 Ha
➤ KTM Batu Betumpang	:	500 Ha
➤ KTM Kikim	:	200 Ha
➤ KTM Rasau Jaya	:	600 Ha
➤ KTM Gerbang Kayong	:	600 Ha
➤ KTM Lamunti	:	200 Ha
➤ KTM Mahalona	:	200 Ha
➤ KTM Kobisonta	:	600 Ha
➤ KTM Telang	:	800 Ha
➤ KTM Mesuji	:	400 Ha
➤ KTM Way Tuba	:	400 Ha
➤ KTM Rawapitu	:	600 Ha

Pengembangan Tanaman Pangan (Jagung) di 3 KTM seluas 675 Ha (fisik 100%):

➤ KTM Ketapang Nusantara	:	250 Ha
➤ KTM Labangka	:	250 Ha
➤ KTM Gerbang Kayong	:	175 Ha

➤ **KEGIATAN PUSAT**

Pengembangan pertanian organik 30 Ha (fisik 100%) di:

- KTM Bathin III Ulu
- KTM Batu Betumpang
- KTM Gerbang Kayong

Pengembangan tanaman pangan (fisik 100%) di :

- Samar Kilang SP.4 seluas 25 Ha (kedelai)
- Jalung SP.1 50 Ha (kedelai)
- Jebus 10,75 Ha (dolomit)
- Sari Putih SP.1 40 Ha (sayuran)
- Simpang Bolon Kab. Tapanuli Utara Prov.Sulawesi Utara 30 Ha
- KTM Ponu 50 Ha (jagung)

Pengembangan seed center 20 Ha di :

- KTM Lamunti Kab. Mesuji Prov. Lampung 10 Ha(fisik 100%)
- KTM Telang Kab. Banyuasin Prov. Sum Sel 10 Ha(fisik 100%)

Pengembangan Inposma 38 Ha di 10 lokasi (fisik 100%):

- XII S. Subulussalam
- Geumpang II SP.3
- Leungah
- Pintu Rime Gayo SP.2 Teget
- UPT VI Bukit Hago
- Gajah Mati SP.7
- Satai Lestari SP.2
- Tanjung Buka SP.6
- Wawondengi/Amahola SP.2

Pengembangan tanaman tahunan di (fisik 100%):

- Bukit ceuranan Kab. Bireun Prov. Aceh 40 Ha (kopi)
- Lengkong Nyadom Kab. Melawi Prov. Kal Bar 100 Ha (karet)
- Buleleng Kab. Morowali Prov. Sul Teng 100 Ha (cengkeh)
- Tandalo Ulumanda Kab. Majene Prov. Sul Bar 125 Ha (pala)

- Awua Jaya Kab. Konawe Prov. Sul Tera 125 Ha (karet)
- Pohuraa Kab. Muna Prov. Sul Tera 25 Ha (cengkeh)
- Amorome Kab. Kon Utara Prov. Sul Tera 125 Ha (pala)
- KTM Tambora Kab. Bima Prov. NTB 90 Ha (kopi)
- Samar Kilang Kab. Bener Meriah Prov. Aceh 50 Ha (lada)
- KTM Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur Prov. Jambi 20 Ha (Tan. Buah)
- Bekkae Kab. Wajo Prov. Sul Sel 112, 5 Ha (Sukun)
- Jalung SP.1 50 Ha (Lada)
- Hualu SP.1, 25 Ha (Tan. Buah)

Pengembangan Peternakan (Ternak Sapi) (fisik 100%):

- KTM Ketapang Nusantara 105 ekor
- KTM Belitang 30 ekor/3 klp
- KTM Rawa Pitu 30 ekor/3 klp
- KTM Mesuji 20 ekor/2 klp
- KTM Gerbang Kayong 20 ekor/2 klp
- KTM Tobadak 30 ekor/3 klp
- KTM Kobisonta 30 ekor/3 klp
- Sungai Bermas 10 ekor/1 klp
- Sungai Besar SP.1 10 ekor/1 klp
- Tanjung Buka SP.8 10 ekor/1 klp
- Sei Rahayu 10 ekor/1 klp
- Marisa V B 10 ekor/1 klp
- Desa Puncak 10 ekor/1 klp
- Lemban Tongoa 10 ekor/1 klp
- Langkoroni 10 ekor/1 klp
- Senggi SP.1 20 ekor/1 klp
- Meratak 30 ekor/3 klp
- Tondasi 30 ekor/3 klp
- Sumulata IV 30 ekor/3 klp
- Liandok 30 ekor/3 klp

- Laeya 30 ekor/3 klp
- Lewumanda 30 ekor/3 klp
- Lamban Sigatal 27 ekor/3 klp
- Susun Kokobuka 36 ekor/4 klp
- Rajang 36 ekor/4 klp
- Jeringo 27 ekor/3 klp
- Nangakara SP.2 27 ekor/3 klp
- Taboulamo SP.1 27 ekor/3 klp
- Amahola 36 ekor/4 klp
- Ulumanda 30 ekor/3 klp

Pengembangan Peternakan (Ternak Kambing)(fisik 100%):

- Simpang Bolon/Garuga 65 ekor/5 klp
- Kolikapa 65 ekor/5 klp
- Kedataran 65 ekor/5 klp
- Singkuang SP.1 65 ekor/5 klp
- Sei Rahayu 65 ekor/5 klp
- Capkala 1,2,3 65 ekor/5 klp
- Rantau Panjang SP.1 65 ekor/5 klp
- Penjalaan 65 ekor/5 klp
- Sei Mata-mata II SP.3 65 ekor/5 klp
- Batu Teritip 65 ekor/5 klp
- Halituku 65 ekor/5 klp
- Klus Kualin 65 ekor/5 klp
- Ulumanda SP.1 39 ekor/3 klp
- Karlutu SP.1 65 ekor/5 klp

Pengembangan Peternakan (Ternak Unggas) (fisik 100%):

- KTM Geragai
- KTM Parit Rambutan

➤ **KEGIATAN DAERAH**

- Bantuan stimulan saprotan untuk Lahan Pekarangan (LP) sebanyak 3.994 KK seluas 399,4 Ha (fisik 92.11%)
- Bantuan stimulan saparotan untuk Lahan Pekarangan (LP) dan Lahan Usaha (LU) sebanyak 2.114 KK seluas 2.008,3 Ha (fisik 100%)
- Bantuan stimulan saparotan untuk Lahan Usaha (LU) sebanyak 6.315 KK seluas 4.736 Ha(fisik 100%)
- Pengembangan tanaman pangan di lamban sigatal Kab. Sarolangun Prov. Jambi seluas 15 Ha(fisik 100%)
- Pengembangan tanaman tahunan di Rajang Kab. Pinrang Prov. Sul Sel 20 Ha (coklat), Buleleng Kab. Morowali Prov. Sul Teng 120 Ha (sawit) (fisik 100%)
- Pengembangan peternakan 54 kelompok (fisik 100%)

Berdasarkan target dan realisasi tersebut di atas, kegiatan luasan lahan produktif dan produktivitas lahan di permukiman transmigrasi/kawasan transmigrasi terdapat kenaikan sebanyak 1.190,05 Ha di kegiatan pusat yang disebabkan oleh optimalisasi anggaran, maka diadakan kegiatan tambahan berupa:

- Pengembangan Tanaman Buah di KTM Geragai Kab. Tanjabtim Prov. Jambi;
- Pengembangan Tanaman Sayuran dan Hortikultura Pemulihan Ekonomi Masyarakat di Kimtrans Sari Putih SP.1;
- Pengembangan Tanaman Buah di Kimtrans Hualu SP.1;
- Sarana Produksi Pengembangan Jagung untuk Fasilitasi Kekeringan di KTM Ponu.

Sedangkan berdasarkan target dan realisasi tersebut di atas, kegiatan luasan lahan produktif dan produktivitas lahan di permukiman transmigrasi/kawasan transmigrasi terdapat penurunan sebanyak 114,2 Ha di kegiatan daerah yang disebabkan oleh adanya kegagalan dalam penempatan transmigran pada lokasi T+1.

Jumlah satuan permukiman (SP)/KPB/Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan usaha ekonominya, dapat dicapai melalui output sebagai berikut :

Layanan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil dan Pemasaran di Satuan Permukiman/KPB/Kawasan Transmigrasi

Berdasarkan target yang ditetapkan bahwa target outputnya sebanyak 38 SP / 15 Kawasan dan sampai akhir tahun pencapaian kinerja (realisasi) sebanyak 38 SP /15 Kawasan atau dapat dikatakan 100%. Layanan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil dan Pemasaran di Satuan Permukiman didanai sebagian besar melalui APBN Tugas Pembantuan di Kabupaten dan sebagian didanai melalui revisi sisa lelang pada APBN Pusat (29 Satker). Sementara itu untuk Layanan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil dan Pemasaran di KPB/Kawasan Transmigrasi didanai melalui APBN Pusat guna mendukung kegiatan hilirisasi agribisnis/agroindustri di kawasan transmigrasi /Kota Terpadu Mandiri, sehingga diharapkan usaha ekonomi di kawasan transmigrasi dapat tumbuh dan berkembang.

Lembaga Ekonomi di Satuan Permukiman /KPB / Kawasan Transmigrasi

Berdasarkan target kinerja output lembaga ekonomi di Satuan Permukiman/KPB/Kawasan Transmigrasi memiliki target sejumlah 204 lembaga, dan capaian kinerja (realisasinya) sejumlah 216 lembaga meliputi kegiatan di pusat maupun di daerah. Kinerja tersebut terdapat realisasi pencapaian kinerja output melebihi target sejumlah 216 lembaga (105,88%), hal ini dapat tercapai karena adanya revisi anggaran dan program (optimalisasi), adapun kegiatannya adalah adanya penambahan kegiatan di pusat yaitu Fasilitasi Penguatan Koperasi/LKM BMT-Trans mendukung Pengalihan Pengembangan Permukiman Transmigrasi Tahun 2015 di 12 SP sebanyak 12 lembaga (Lbg)

Layanan Kewirausahaan di satuan permukiman/ kawasan transmigrasi.

Dari penetapan kinerja sejumlah 2.000 orang wirausahawan yang ditumbuhkan/dikembangkan, tercapai (terrealisir) sejumlah 1.988 orang wirausahawan. dengan rincian pusat 1.648 orang (99.8%) dan daerah 340 orang (97 %), sedangkan layanan kewirausahaan kegiatannya antara lain adalah Pengadaan Sarana Usaha dalam rangka Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan di 29 Kimtrans , Pameran

Kewirausahaan, Temu teknis pelopor kewirausahaan, fasilitasi kemitraan usaha, Sosialisasi Ketransmigrasian, Sosialisasi melalui pengembangan masyarakat.

Berdasarkan target dan realisasi tersebut diatas terdapat keberhasilan pencapaian target. Hal tersebut ditunjang oleh :

1. Program kegiatan yang sesuai dan berkesinambungan
2. Pengendalian yang sesuai dengan jadwal yang direncanakan
3. Sumber daya manusia yang berkomitmen
4. Biaya untuk mendukung kegiatan yang memadai

Namun ada beberapa kendala yang dirasakan antara lain :

1. Personil yang terbatas
2. Pendanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan

Dalam hal ini ditawarkan solusi berupa, penambahan personil dan sosialisasi program harus lebih dioptimalkan.

Realisasi Anggaran

Dukungan anggaran Kegiatan Pengembangan Usaha Transmigrasi setelah revisi sebesar Rp. 552.505.203.000,- (Lima ratus lima puluh dua milyar lima ratus lima juta dua ratus tiga ribu rupiah) yang terdiri pusat dan daerah. Adapun realisasi penyerapan anggaran sampai dengan posisi 31 Desember 2015 dalam mendukung pelaksanaan indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu	Realisasi		
			Keuangan	%	Fisik%
1	Pusat	159.634.781.000	156.155.778.589	96,76	97,62
2	Daerah	60.409.481.000	57.000.551.638	95,33	96,59
	Jumlah	220.044.262.000	213,156,330,227	96,05	97,11

Realisasi capaian kinerja kegiatan Pengembangan Usaha Transmigrasi dapat dikatakan **berhasil** karena lebih besar dari Target yang telah ditetapkan, dan dikarenakan yang ada karena adanya optimalisasi dan APBN-P Tahun 2015 yang memungkinkan untuk pencapaian realisasi lebih.

D. Analisis Sasaran 4

SASARAN 4			
Tersedianya Satuan Permukiman (SP), KPB, Kawasan yang Mencapai Tingkat Perkembangan Sosial Budaya Sesuai dengan Tahapan Pengembangannya			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah keluarga yang mendapat bantuan pangan di Satuan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 11.278 KK 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 8.225 KK 	75,49 %
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Satuan Permukiman (SP)/KPB/Kawasan yang mendapat layanan sosial budaya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 96 SP/KPB/KWS 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 170 SP/KPB/KWS 	177,08 %
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah SP/KPB/Kawasan yang lembaga sosial budayanya terbentuk dan berfungsi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 179 Lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 340 Lembaga 	189,94 %

Indikator Kinerja Kegiatan diatas dapat dicapai melalui capaian output sebagai berikut:

Indikator Jumlah keluarga yang mendapat bantuan pangan di Satuan Permukiman

Bantuan Pangan

Kegiatan Pusat

- Beras Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dititipkan di Perum Bulog Pusat sejumlah : 763.673,33 kg dengan rincian sebagai berikut :
 - Stock beras per 31 Desember 2014 : 653.673,33 Kg

- Pengadaan Pusat tahun 2015 : 110.000,00 Kg
- Total persediaan beras pusat sejumlah : 763.673,33 Kg telah didistribusikan ke daerah melalui penerbitan prinlog sejumlah 70.965,34 Kg, sehingga masih terdapat sisa stock beras per 31 Desember 2015 sejumlah : 692.707,99 Kg (763.673,33 Kg – 70.965,34 Kg).
- Bimbingan Teknis (Bintek) Layanan Bantuan Pangandaerah asal (2 Provinsi), daerah penempatan (1 Provinsi).
- Pembinaan dan pengendalian (2 provinsi, 26 Kimtrans).
- Koordinasi Bidang Pangan (12 Paket).
- Penyaluran Beras (Prinlog) ke 3 Provinsi (Riau, Bangka Belitung dan Sulawesi Tenggara) sejumlah 70.965,34 Kg dan untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran beras di Daerah dilaksanakan uji petik ke 3 (tiga) provinsi (Aceh, Sumatera Selatan dan Maluku Utara)

Kegiatan Daerah

- Penyediaan dan penyaluran bantuan pangan dengan realisasi beras 1.569.275 kg, (8.225 KK) non beras 35.374 paket (7.127 KK), dan masih terdapat sisa stock beras per 31 Desember 2015 : 1.414.286,04 Kg.
- Pembinaan dan Pengendalian (19 Provinsi)

Indikator Jumlah Satuan Permukiman (SP)/KPB/Kawasan yang mendapat layanan sosial budaya

Bantuan Kesehatan

Pemberian bantuan layanan kesehatan kepada **33.683**KK di satuan permukiman transmigrasi dilaksanakan untuk semua kimtrans yang masih dibina oleh Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi (T+1 sampai dengan T+n) dengan kegiatan yang dilaksanakan :

Kegiatan Pusat

- Pembinaan dan pengendalian Layanan Kesehatan (11 provinsi).

- Fasilitasi Peningkatan Gizi dan Kemandirian Pangan (3paket) di Kimtrans Gajah Mati SP7 Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, di kimtrans Hyang Bana SP 1 Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kimtrans Sungai Besar Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
- Bintek Layanan bantuan kesehatan 4 Provinsi (3 Provinsi Daerah Asal dan 1 Provinsi daerah Penempatan)
- Penggandaan Buku Pedoman Layanan Kesehatan (2 Paket)
- Rujukan Pasien dan Dukungan Operasionalnya (3 orang)
- Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kesehatan Untuk KPB/KTM (6 paket) sebagai berikut :

KTM Tambora Provinsi Nusa Tenggara Barat, KTM Hialu Provinsi Sulawesi Tenggara, KTM Rawa Pitu Provinsi Lampung, KTM Rasau Jaya Provinsi Kalimantan Barat, KTM Labangka Provinsi Nusa Tenggara Barat dan KTM Ponu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Untuk SP/Kimtrans Kesehatan (23 paket) yaitu Kimtrans Pintu Rime, Provinsi Aceh, Sungai Bernas Provinsi Jambi, Tanabang SP 2, Cekar Bunga Mas V/F/SP 10, Air Balui, Gajah Mati SP 7 Provinsi Sumatera Selatan, Cinta Puri Provinsi Kalimantan Selatan, Sungai Besar, Kamboja/P. Maya Provinsi Kalimantan Barat, Tanjung Buka Provinsi Kalimantan Utara, Puncak Provinsi Gorontalo, Supi Provinsi Sulawesi Selatan, Boteng Pasembuk Provinsi Sulawesi Barat Wawon Dengi/Amahola Provinsi Sulawesi Tenggara, Jut Nganti Provinsi Sumatera Selatan, Teluk Pekedai Kalimantan Barat, Telang Siong Provinsi Kalimantan Tengah, Tinauka SP 2, Poongan Provinsi Sulawesi Tengah, Pohurua Provinsi Sulawesi Tenggara, Rante Karuan Provinsi Sulawesi Selatan, Brang Lamar Provinsi NTB dan Klus Kualin Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan Daerah

- Insentif Tenaga Kesehatan (Dokter 133 orang, Paramedis 335 orang).

- Pengadaan obat-obatan (OSSE, OSE, dan OE) sejumlah 35.720 paket dan angkutannya 247 paket.
- Rujukan Pasien dan Dukungan Operasionalnya (44.281 Paket)
(provinsi : 10.340 orang, Kabupaten : 33.941 orang)
- Pengadaan Perlengkapan Pustu (23 paket).
- Pengadaan Alat Kesehatan/Bidan Kit (4 Paket).
- Dukungan Operasional Pustu/Posyandu (941 paket).

Layanan Pendidikan, Mental Spiritual, Seni Budaya

- Fasilitasi Pendidikan(1 Paket) berupa :
Bantuan Alat Peraga SD berbasis kompetensi dengan pendekatan edutainment untuk 100 SD, yang tersebar 5 Provinsi (Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Maluku Utara, 13 Kabupaten (Pesisir Selatan, Kotabaru, Luwu Timur, Luwu Utara, Toraja Utara, Wajo, Gorontalo, Boalemo, Gorontalo Utara, Pahuwato, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Kota Tidore Kepulauan).
- Bantuan sarana prasarana pendidikan SLTA sebanyak 6 Paket tersebar di 6 KTM, yaitu KTM Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, KTM Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, KTM Hialu Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, KTM Labangka Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, KTM Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat, dan KTM Belitang Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan.
- Pengadaan Perlengkapan Gedung SLTP sebanyak 3 Paket tersebar di KTM Batin III Ulu Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, KTM Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat dan KTM Labangka Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Pengadaan perlengkapan Gedung SD sebanyak 26 Paket tersebar di 26 Kimtrans dan 12 Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi

Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Provinsi Maluku Utara.

- Pengadaan perlengkapan PAUD sebanyak 24 Paket tersebar di 24 Kimtrans dan 9 Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur.
- Pengadaan perlengkapan rumah pintar sebanyak 4 paket tersebar di 4 KTM (KTM Batin III Ulu Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, KTM Rawa Pitu Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, KTM Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat dan KTM Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat).
- Pengadaan buku Perpustakaan Unsoed (40 buku).
- Bantuan Bea siswa UNSOED sejumlah : 112 orang dan bantuan beasiswa untuk UIN Raden Patah : 15 orang
- Pembinaan dan Pengendalian Fasilitas Pendidikan : 12 Provinsi (Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan NTB)
- Evaluasi alat peraga SD : 7 provinsi (Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan NTB)
- BinteK alat peraga SD : 13 kabupaten, 5 provinsi (Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Maluku Utara)
- Pengadaan sarana rumah ibadah sebanyak 4 Paket untuk KTM Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, KTM Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, KTM Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
- Pengadaan Sarana Rumah Ibadah di Kimtrans sebanyak 5 Paket yaitu Kimtrans Buleleng Kabupaten Morowali, kimtrans Watuawu Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, Kimtrans Gajah Mati SP 7 Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kimtrans Cekar Bunga Mas Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan,

Kimtrans Laeya Kabupaten Buton Utara, Kimtrans Amahola SP 2 Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan kintrans Nangkara SP 2 Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Pembinaan dan pengendalian layanan mental spiritual dan Seni Budaya 5 Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Timur.
- Insentif Tenaga Pengasuh/Dai Pusat Pendidikan Pengembangan agama sejumlah 3 KTM yaitu KTM Telang, KTM Rambutan Parit dan KTM Mesuji masing-masing KTM sebanyak 12 orang.
- Fasilitas Bimtek Wawasan Kebangsaan 2 Paket yaitu Provinsi Sumatera Selatan sejumlah 30 orang dan Nusa Tenggara Barat sejumlah 120 orang.
- Pengadaan Sarana Pengembangan Masyarakat Transmigrasi di bidang layanan mental sipiritual (4 paket) yaitu Pondok Pesantren Lirboyo Kabupaten Jombang 2 Paket, Alat Kesenian Daerah untuk masyarakat kecamatan Sumber Marga Telang 1 Paket dan masyarakat kecamatan Muara Telang 1 paket, kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- Pembinaan dan pengendalian Pusat pengembangan pendidikan agama 5 KTM yaitu KTM Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, KTM Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, KTM Telang Kabupaten Banyuasin, KTM Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, KTM Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan Daerah

- Insentif tenaga kependidikan (guru SMP :36 orang, guru SD: 1.020 orang, guru TK/PAUD : 336 orang
- Pengadaaan buku Pelajaran SD : (170 paket)
- Operasional perpustakaan : (127 paket)
- Peningkatan KapasitasMental spiritual/Rohaniawan sebanyak 2.040 orang Dai 1.170 orang dan daiyah 765 orang, rohaniawan 105 orang/protestan/katholik dan pengelola Badang IC 5 orang tersebar di 3 provinsi sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat.

Indikator Jumlah SP/KPB/Kawasan yang lembaga sosial budayanya terbentuk dan berfungsi

Pendampingan / pemberdayaan di Kimtrans

Kegiatan Pusat

- Fasilitasi Bintek Manajemen Kelembagaan Kimtrans (1 Provinsi)
- Pemilihan Pembina dan Transmigran Teladan Tingkat Nasional Tahun 2015 sebanyak 42 Orang. (22 Transmigran Teladan dan 20 Pembina UPT Teladan)
- Pendampingan / pemberdayaan masyarakat transmigran di 9 Satuan Permukiman ; Provinsi Sulawesi Tengah kabupaten Donggala (Tinauka SP.1 dan SP.2), Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Musi Rawas (Cecar Bunga Mas V/F/SP.10), Provinsi Kalimantan Tengah kabupaten Seruyan (Ds. Tanggul Harapan), Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Toraja Utara (Rante Karua Sp.2), Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe Utara (Padalere), Kalimantan utara kabupaten Bulungan (Tanjung Buka SP.5, SP.5A dan SP.9)

Kegiatan Daerah

- Bintek Manajemen Kelembagaan Kimtrans di 2 (dua) provinsi
- Operasional pengelolaan permukiman transmigrasi (188 kimtrans).
- Dukungan Kelembagaan Permukiman (170 Kimtrans)
- Dukungan Kelembagaan Pemerintahan Desa (170 Kimtrans).
- Pembentukan, Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan pemerintah dan Masyarakat (340 Lembaga di 376 Kimtrans)

Pencapaian kinerja bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sosial budaya transmigrasi, sekaligus memberikan tindak lanjut sebagai solusi untuk pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang. Capaian kinerja berdasarkan Rencana Kerja tahun 2015 tidak dapat terealisasi 100% hal ini disebabkan :

- Pemberian bantuan pangan dari target 10.895 KK hanya dapat terealisasi 8.225KK (75,49%) karena terdapat sisa target penempatan transmigran sejumlah 2.761 KK. Dan hal ini berdampak pada realisasi layanan kebutuhan dasar lainnya (kesehatan, pendidikan), dan operasional permukiman transmigrasi.
- Program penempatan transmigrasi yang sering berubah dan tidak tercapainya realisasi penempatan transmigran sesuai target sehingga target pemberian layanan kebutuhan tidak tercapai.
- Keterbatasan Tenaga Pembina, Tenaga Pendidik (Guru) dan Tenaga Kesehatan di Kimtrans disebabkan rekrutmen/pengangkatan dan penempatan pegawai menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) setempat.
- Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang terbatas.
- Belum semua Transmigran menjadi peserta BPJS Kesehatan.
- Belum seluruh transmigran bina mendapatkan akses layanan administrasi kependudukan (KTP) yang berakibat keterbatasan program layanan kebutuhan dasar dari lintas sektor/Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Badan Pengelola KTM yang telah terbentuk pada umumnya belum berfungsi dengan optimal.

Untuk menindaklanjuti kendala – kendala tersebut diupayakan hal-hal sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi dengan Ditjen PKP2KTrans untuk sinkronisasi program penempatan transmigrasi.
- Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait untuk kolaborasi program di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, pembinaan mental spiritual dan pengembangan kelembagaan masyarakat, serta akses layanan administrasi kependudukan dan khusus untuk layanan BPJS Kesehatan koordinasi dengan Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial setempat.
- Fasilitasi dan pendampingan Badan Pengelola KTM.

- Mengoptimalkan tugas dan fungsi tenagapembina (Kimtrans, Kabupaten/Kota/Provinsi) melalui fasilitasi, bintek, sosialisasi dan pendampingan.
- Meningkatkan pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi mulai dari pusat sampai tingkat lapangan.
- Untuk mempercepat proses kemandirian kimtrans dan kawasan dilakukan pendampingan lembaga dan masyarakat.

Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kegiatan Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi Ditjen PKTrans pada Tahun Anggaran 2015 mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 137.475.459.000 yang terdiri dari :

No	Uraian	Pagu	Realisasi		
			Keuangan	%	Fisik%
1	Pusat	159.634.781.000	156.155.778.589	96,76	97,62
2	Daerah	60.409.481.000	57.000.551.638	95,33	96,59
	Jumlah	137.475.459.000	124,931,396,852	90,88	93,21

Realisasi kinerja berdasarkan anggaran Direktorat Pengembangan Sosial Transmigrasi tahun 2015 sebesar 90,88% dan fisiknya 93,21%, dapat dikatakan berhasil secara capaian kinerja maupun keuangan, tetapi ke depan diharapkan permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan upaya tindak lanjut yang tepat.

E. Analisis Sasaran 5

SASARAN 5			
Terfasilitasinya Pelayanan Pertanahan Transmigrasi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah bidang tanah transmigrasi yang difasilitasi pengurusan sertifikatnya 	24.889 persil/bidang	25.266 persil*	101,51 %

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah masalah pertanahan transmigrasi yang difasilitasi penanganannya 	20 Kasus	22 kasus*	110 %
--	----------	-----------	-------

***Optimalisasi Anggaran**

Berdasarkan capaian kinerja di atas terlihat bahwa dengan adanya optimalisasi anggaran maka seluruh indikator kinerja dapat tercapai dan bahkan lebih dari target yang telah ditetapkan

Indikator Jumlah bidang tanah transmigrasi yang difasilitasi pengurusan sertifikatnya

Capaian Outputnya dapat dicapai melalui :

- a. Jumlah bidang tanah transmigrasi yang difasilitasi pengurusan sertifikatnya dari targaet 24.889 persil dapat tercapai sebanyak 25.266 persil atau sebesar 101.51% terdiri dari :
 - 1) Pengukuran Lahan Pekarangan - 2.360 persil
 - 2) Pengukuran Lahan Usaha I - 2.360 persil
 - 3) Pengukuran Lahan Usaha II - 225 persil
 - 4) Inventarisasi Kepemilikan Lahan - 10.339 persil
 - 5) Pengurusan Sertifikat Hak Milik- 9.982 persil

Indikator Jumlah masalah pertanahan transmigrasi yang difasilitasi penanganannya

Jumlah masalah pertanahan transmigrasi yang difasailitasi penanganannya dari target 20 kasus dapat direalisasikan sebanyak 22 kasus atau 110 %, terdiri dari:

- 1) Pemberian Kompensasi Lahan Usaha sebanyak 3 kasus
- 2) Identifikasi Permasalahan Pertanahan Transmigrasi sebanyak 19 kasus

Dengan upaya memaksimalkan pengelolaan alokasi anggaran yang tersedia serta menetapkan skala prioritas program, maka capaian output Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi dapat dikategorikan berhasil dan bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi berdasarkan pagu DIPA tahun 2015, yang dilaksanakan di Pusat maupun Daerah, sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu	Realisasi		
			Keuangan	%	Fisik%
1	Pusat	3.129.158.000	2.925.383.600	93.49	98.00
2	Daerah	11.788.784.000	9.701.066.950	82,29	87.22
	Jumlah	14.917.942.000	12.626.450.550	84.64	92.61

Realisasi kinerja berdasarkan anggaran Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi tahun 2015 sebesar 84,64% dan fisiknya 92,61%, dapat dikatakan jauh dari realisasi optimal tetapi berdasarkan pengukuran skala ordinal, capaian kinerja dapat dikategorikan dalam skala **baik atau berhasil**

F. Analisis Sasaran 6

SASARAN 6			
Tersedianya Satuan Permukiman (SP)/Kawasan Transmigrasi yang Berkembang Melalui Kemitraan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
<ul style="list-style-type: none"> Jumlah lembaga dan kelompok masyarakat yang bersedia berpartisipasi sebagai mitra dalam pengembangan kawasan transmigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> 12 Lembaga/ Kelompok Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> 12 Lembaga/ Kelompok Masyarakat 	100 %

Realisasi pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) / Output / Komponen sampai akhir Bulan Desember 2015 adalah sebagai berikut :

- Layanan Promosi dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi capaian dan targetnya sudah sesuai yaitu 12 SP/KPB/Kawasan

- Layanan Kemitraan 12 PKS/IPT realisasinya menjadi 50 PKS/9 IPT dengan rincian sebagai berikut :

1. Ijin pelaksanaan transmigrasi di kawasan transmigrasi dalam bentuk layanan kemitraan badan usaha target 6 IPT dengan realisasi 9 Draft penelaahan administasi dan teknis IPT
2. Perjanjian kerjasama di kawasan transmigrasi dalam bentuk layanan kemitraan Masyarakat, target 1 PKS dengan realisasi menjadi 49 PKS meliputi :
 - 4 Perjanjian Kerja Sama yang terdiri dari kerjasama dengan Patayat NU, Kerjasama Muslimat NU, Kerjasama PATRI, serta kerjasama JPS (Jaringan Paralegal Indonesia)
 - 45 Perjanjian Kerja Sama dengan Perguruan tinggi dengan dana di Direktorat lain
3. Perjanjian kerjasama di kawasan transmigrasi dalam bentuk layanan kemitraan Kelembagaan dengan realisasi 1 Perjanjian Kerja Sama

Adapun secara garis besar capaian kinerja kegiatan Promosi dan Kemitraan berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan, maupun Outputnya dapat dikatakan berhasil dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Realisasi Anggaran

No	Uraian	Pagu	Realisasi		
			Keuangan	%	Fisik%
1	Pusat	14.231.731.000	12.756.856.961	89,60	91,22
2	Daerah	1.078.481.000	968.249.325	88,98	92,65
	Jumlah	15.306.812.000	12.626.450.550	89,35	92,45

Realisasi kinerja berdasarkan anggaran Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi tahun 2015 sebesar 89,35% dan fisiknya 92,45%. berdasarkan

pengukuran skala ordinal, capaian kinerja dapat dikategorikan dalam skala **baik atau berhasil**

Analisis Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Nilai capaian kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi pada tahun 2015 **dapat dicapai 100,00%, sebagaimana dalam tabel berikut :**

Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) dan Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi Embrio kota kecil/kota kecamatan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase
▪ Jumlah Satuan Permukiman (SP) Mandiri	▪ 19 SP	▪ 19 SP	100 %
▪ Kawasan yang berkembang sebagai embrio Pusat Pertumbuhan	▪ 6 KPB	▪ 6 KPB	100 %

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan diatas adalah Indikator Kinerja Utama Ditjen PKTrans yang didapat dan didukung dari hasil capaian Indikator Kinerja Kegiatan yang ada di Ditjen PKtrans. Adapun Satuan Permukiman Mandiri adalah Pengembangan Satuan Permukiman menjadi satu kesatuan dengan pelayanan Pemerintah dan Pelaksanaanya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, berikut adalah 19 Kimtrans Mandiri tersebut :

- UPT. Lamban Sigatal Kab. Sorolangun Jambi
- UPT. Bandar Agung Kab. Lebong Bengkulu
- UPT. Jatisari Kab. Banyuasin Sumsel
- UPT. Kumai Seberang Kab. Kota Waringin Barat Kalteng
- UPT. Kandan Kab. Kota Waringin Timur Kalteng
- UPT. Siayuh Kab. Kota Baru Kalsel
- UPT. Jejangkit Timur Kab. Batola Kalsel
- UPT. Meratak Kab. Kutai Timur Kaltim

- UPT. Ds. Sambungan Kab. Tanah Tidung Kaltim
- UPT. Wioi Kab.Minahasa Selatan Sulut
- UPT. Kokobuka Kab.Buol Sulteng
- UPT. Balingara Kab. Tojo Una-Una Sulteng
- UPT. Rajang Kab. Pinrang Sulsel
- UPT. Amahola Kab. Konawe Selatan Sultera
- UPT. Maudi Kab. Tidore Kepulauan Malut
- UPT. Daruba Kab. Morotai Malut
- UPT.Sori Panihi Sp.5 Kab. Bima NTB
- UPT. Jeringgo Kab.Lombok Timur NTB
- UPT. Nangakara Kab. Dompu NTB

Sedangkan Kawasan Perkotaan Baru yang mendapatkan prioritas pengembangan kawasan baik secara insfrastuktur, pengembangan usaha ekonomi, agroindustri dan agrobisnisnya, sosial budayanya dan diharapkan tumbuh menjadi embrio pusat pertumbuhan adalah :

- KTM Telang Kab.Banyuasin Sumsel
- KTM Belitang Kab. OKU Timur Sumsel
- KTM Lunang Silaut Kab. Pesisir Selatan Sumbar
- KTM Mesuji Kab. Mesuji Lampung
- KTM Rasau Jaya Kab. Kubu Raya Kalbar
- KTM Tobadak Kab.Mamuju Tengah Sulbar

B. REALISASI ANGGARAN

Dukungan anggaran Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebesar **Rp. 1.008.829.982.000,-** (Tujuh ratus Sembilan puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah.) untuk mendukung kegiatan di Pusat sebesar Rp. 270.687.925.000,- (Dua ratus tujuh puluh milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk mendukung kegiatan di daerah sebesar Rp. 738.142.057.000,- (Tujuh ratus tiga puluh delapan milyar seratus empat puluh dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah). Sampai dengan posisi 31 Desember 2015,

realisasi anggaran sebesar **Rp. 945.534.038.714 (93,73 %)** dan **realisasi fisik sebesar 97,39 %** secara rinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel Realisasi Keuangan dan Fisik Ditjen. PKTrans Tahun 2015 (Pusat Daerah)

NO	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI		
			KEUANGAN (Rp.)	%	FISIK (%)
1.	Pusat	270.687.925.000	253.438.929.824	93,63	96.11
2.	Daerah	738.142.057.000	692,095,153,982	93,76	98.75
TOTAL		1.008.829.982.000	945.534.038.714	93.73	97.39

Tabel Realisasi Keuangan dan Fisik Ditjen. PKTrans Tahun 2015 (Per Kegiatan)

NO	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI		
			KEUANGAN (Rp.)	%	FISIK (%)
1.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen PKTrans	68,580,304,000	57,534,658,257	83.39	99.18
2.	Dit. PPSPK	552,505,203,000	523,607,968,870	94.77	98.75
3.	Dit PUT	220,044,262,000	213,156,330,227	96.87	97,35
4.	Dit PSBT	137,475,459,000	124,931,396,852	90,88	92.24
5..	Dit PPT	14,917,942,000	12,626,450,550	84,64	91.44
6.	Dit Promosi dan Kemitraan	15,306,812,000	13,677,233,958	89.35	91.56
TOTAL		1.008.829.982.000	945.534.038.714	93.73	97.39

Berdasarkan capaian realisasi keuangan yang ada, ada beberapa kegiatan yang masih kurang bagus, tetapi secara keseluruhan berdasarkan apa yang telah dicapai maka bisa dikatakan dengan capaian 93,73 adalah capaian baik dan berhasil

BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

Secara umum pelaksanaan program Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi tahun 2015 tidak mengalami hambatan yang berarti. Hal tersebut dapat dilihat dari pengukuran pencapaian sasaran maupun dari akuntabilitas keuangan.

Dilihat dari pengukuran kinerja dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kinerja adalah **berhasil**. Namun demikian keberhasilan itu akan lebih berarti apabila permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi dapat diselesaikan secara signifikan. Oleh karena itu program yang telah disusun masih memerlukan penyempurnaan mengingat masih banyaknya permasalahan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.

B. TINJAUAN KHUSUS

Permasalahan yang belum dapat diatasi khususnya permasalahan di tingkat lapangan (daerah) akan diselesaikan di dalam penyusunan program tahun anggaran 2015 yang lebih dititik beratkan kepada peningkatan kerjasama dengan lembaga terkait khususnya pemerintah daerah setempat. Langkah yang dilakukan melalui koordinasi dan jejaring yang kolaboratif baik di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan masyarakat, pengembangan usaha, pengembangan sarana dan prasarana kawasan maupun promosi dan kemitraan.

C. SARAN DAN TINDAKLANJUT

Di bidang pengumpulan data dan penyusunan laporan peningkatan koordinasi akan sangat membantu dalam upaya kerjasama dengan pemerintah daerah setempat disamping perlu dilakukan peningkatan kompetensi SDM (Tim Pelaksana) sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan ;

Agar meningkatkan koordinasi dan jejaring yang kolaboratif akan sangat membantu dalam upaya kerjasama dengan pemerintah daerah setempat, meningkatkan pemantauan dan pengendalian dan apabila dipandang perlu melakukan tindakan turun tangan dari Pusat untuk melakukan kerjasama/memfasilitasi dengan instansi/lembaga di tingkat daerah, serta meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka mempercepat peningkatan sumber daya manusia dan persamaan persepsi pembangunan dan pengembangan di kawasan transmigrasi.

Sistem informasi di kawasan transmigrasi perlu disempurnakan, agar mekanisme kerja dan jejaring antara pusat dan daerah dapat terbangun secara optimal, sehingga masyarakat di kawasan transmigrasi ketika menghadapi permasalahan segera mengetahui akses dengan cepat untuk mendapatkan informasi diantara stakeholder .

**Direktorat Jenderal
Pengembangan Kawasan Transmigrasi**

Roosari Tyas Wardani